



OPTIMIZING FISCAL POLICY

To Realize Global Net Zero Emission 2050
As A Momentum To Achieve
Sustainable Development Goals (SDGs)

Nadia Az-Zahra Prabawati, Lidya Meina Chairunnisa, Nabela Suspa Deya,
Andreas Pandu Prasetya, Kharissima Ndaru Amallia, Revinsya Amrizal,
Nafarida Santika Rahma, Ayun Hanafiyah, M. Ancilla Sonia P. A, Elfira Andara A,
Jessyca Wulandari, Aji Widya Firmansyah, Alfian Royvaldo Aryo Wibowo,
Yesika Suryani, Zella Alnahda, Kayla Gitara, Yesika Mita Lela Pardede,
Anjani Bunga Irawan, Afifah Salna Putri, Muhammad Adzka Isma P. Dhana,
Natalie Syaina Abitta, Aqila Bagus Misbahuddin, Shaula Nada Aulia,
Rais Ridho Bintang Arfani, Nazwa Azzahra, David Susanto,
Ferdinand Yiwa, Sang Ketut Wahyu Paramartha Kebon.



OPTIMIZING FISCAL POLICY

**To Realize Global Net Zero Emission 2050
As A Momentum To Achieve
Sustainable Development Goals (SDGs)**

Nadia Az-Zahra Prabawati, Lidya Meina Chairunnisa, Nabela Suspa Deya,
Andreas Pandu Prasetya, Kharissima Ndaru Amallia, Revinsya Amrizal,
Nafarida Santika Rahma, Ayun Hanafiyah, M. Ancilla Sonia P. A, Elfira Andara A,
Jessyca Wulandari, Aji Widya Firmansyah, Alfian Royvaldo Aryo Wibowo,
Yesika Suryani, Zella Alnahda, Kayla Gitara, Yesika Mita Lela Pardede,
Anjani Bunga Irawan, Afifah Salna Putri, Muhammad Adzka Isma P. Dhana,
Natalie Syaina Abitta, Aqila Bagus Misbahuddin, Shaula Nada Aulia,
Rais Ridho Bintang Arfani, Nazwa Azzahra, David Susanto,
Ferdinand Yiwa, Sang Ketut Wahyu Paramartha Kebon.

**OPTIMIZING FISCAL POLICY TO REALIZE GLOBAL NET ZERO EMISSION 2050
AS A MOMENTUM TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)**

Penulis:

**Nadia Az-Zahra Prabawati, Lidya Meina Chairunnisa, Nabela Suspa Deya,
Andreas Pandu Prasetya, Kharissima Ndaru Amallia, Revinsya Amrizal,
Nafarida Santika Rahma, Ayun Hanafiyah, M. Ancilla Sonia P. A, Elfira Andara A,
Jessyca Wulandari, Aji Widya Firmansyah, Alfian Royvaldo Aryo Wibowo,
Yesika Suryani, Zella Alnahda, Kayla Gitara, Yesika Mita Lela Pardede,
Anjani Bunga Irawan, Afifah Salna Putri, Muhammad Adzka Isma P. Dhana,
Natalie Syaina Abitta, Aqila Bagus Misbahuddin, Shaula Nada Aulia,
Rais Ridho Bintang Arfani, Nazwa Azzahra, David Susanto,
Ferdinand Yiwa, Sang Ketut Wahyu Paramartha Kebon.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Evi Damayanti

ISBN:

978-623-459-849-0

Cetakan Pertama:

Desember, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa Syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “*Optimizing Fiscal Policy to Realize Global Net Zero Emission 2050 as A Momentum to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)*” telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang perpajakan.

Ketika peran pajak kian penting dan ketika nafsu utang semakin besar, serta tuntutan pendanaan pembangunan meningkat, ternyata pemerintah juga kian getol mengeluarkan obligasi negara. Oleh karena itu, beban keuangan terkuras untuk menutup pembiayaan itu. Padahal, potensi pajak masih terbuka dieksplorasi dan dieksploitasi penerimaannya. Ironisnya, di sisi lain kasus perpajakan menjadi anti klimaks dari komitmen Ditjen Pajak untuk mendorong kesadaran dan kepedulian serta tingkat kepatuhan wajib pajak, bukan hanya wajib pajak badan tetapi juga perorangan. Dari fakta ini, target peroleh pajak tahun 2023 kian berat untuk direalisasikan, meski di sisi lain tetap harus optimis bahwa masih ada potensi untuk mencapai target. Oleh karena itu, target perolehan pajak tidak bisa lepas dari program edukasi. Suksesnya edukasi secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga memunculkan kesadaran dari masyarakat terkait urgensi penerimaan pajak. Membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga harus diimbangi dengan profesionalisme dan edukasi kepada wajib pajak agar muncul kesadaran kolektif dari urgensi pajak. Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB dalam rangka ingin menyejahterakan masyarakat dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di negara yang membutuhkan bantuan.

Akan tetapi, pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “Tiada gading yang tak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami

untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca. Semoga buku ini bisa bermanfaat untuk semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 OPTIMALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK MENDUKUNG TERCAPAINYA NET ZERO EMISSION 2050 DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS	1
A. Emisi Karbon dan Kendaraan Bermotor	1
B. Kebijakan Pajak.....	4
C. Pajak Pigouvian.....	4
D. Pajak Kendaraan Bermotor	5
E. <i>Tax Earmarking</i>	5
F. Overview Kebijakan PKB di Indonesia	5
G. Menelisik Kebijakan PKB di Negara Lain.....	7
H. Menakar Skema Kebijakan PKB di Indonesia	8
I. Peluang dan Tantangan	10
J. Kesimpulan	11
BAB 2 STRATEGI PENERAPAN INSENTIF PAJAK BANGUNAN HIJAU UNTUK MENGURANGI EMISI KARBON DI INDONESIA	15
A. Insentif Pajak Bangunan Hijau dan Emisi Karbon di Indonesia	15
B. Pajak Properti	18
C. Insentif Pajak	19
D. <i>Green Building Incentives</i>	19
E. <i>Property Tax Assesment Incentive Model</i>	19
F. Penerapan Insentif Pajak Properti Bangunan Hijau di Berbagai Negara	20
G. Kelebihan dan Kekurangan Insentif Pajak Properti Bangunan Hijau di Indonesia	22
H. Strategi Perencanaan Pengembangan Kebijakan Insentif Pajak Properti Bangunan Hijau di Indonesia	24
I. Kesimpulan	27
BAB 3 CARBON TAX SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENDORONG GREEN BEHAVIOUR PADA INDUSTRI FASHION	31
A. Modernitas dan Cara Berpakaian	31
B. <i>Carbon Tax</i>	33
C. <i>Fast Fashion</i>	33
D. <i>Green Behaviour</i>	33
E. <i>Net Zero Emission (NZE)</i>	33

F. <i>Benchmark</i> Kebijakan Pajak Atas <i>Fast Fashion</i> di Beberapa Negara.....	34
G. Komparasi Berbagai Jenis Pajak Yang Tepat Berdasarkan Teori <i>Four Maxim</i> Dalam Industri <i>Fashion</i>	35
H. Siklus 4R Sebagai Pengelolaan Limbah Industri <i>Fashion</i>	35
I. Ekstensifikasi <i>Carbon Tax</i> Pada Industri <i>Fashion</i>	37
J. Analisis Proyeksi Dari Potensi Penerimaan dan Alokasi <i>Carbon Tax</i>	38
K. Analisis <i>Strength, Weakness, Opportunities,</i> dan <i>Threats</i> (SWOT) Melalui Kebijakan Ekstensifikasi <i>Carbon Tax</i> Pada Industri <i>Fashion</i>	40
L. Kesimpulan	41

**BAB 4 MENCAPAI NET ZERO EMISSION 2050 MELALUI
INSENTIF FISKAL ATAS PEMBANGUNAN STASIUN
PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK.....**

A. <i>Net Zero Emission</i> dan Insentif Fiskal Pembangunan Stasiun Kendaraan Listrik	47
B. Fungsi <i>Regulerend</i> Pajak	50
C. Insentif Fiskal	50
D. Insentif Pajak	50
E. Belanja Perpajakan	51
F. <i>Supply Side Tax Policy</i>	51
G. <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI).....	51
H. Urgensi Pemberian Insentif Fiskal Atas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik.....	51
I. Bea Masuk dan PPN.....	52
J. Bunga Pinjaman Bank	53
K. PBB dan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	55
L. Pajak Penghasilan Badan	56
M. Kesimpulan	56

**BAB 5 PENGENDALIAN KONSUMSI DENGAN PENGENAAN CUKAI
BBM DALAM RANGKA MENEKAN EMISI KARBON**

A. Cukai BBM Untuk Menekan Emisi Karbon.....	61
B. Eksternalitas Negatif.....	63
C. Cukai	64
D. <i>Pigouvian Tax</i>	64
E. <i>Polluter Pays Principle</i>	64
F. <i>Benchmarking</i> Kebijakan Cukai BBM di Berbagai Negara	65
G. Rancangan Kebijakan Ideal Cukai BBM	66
H. Simulasi Perhitungan Cukai BBM.....	67

I. Kesimpulan	69
J. Saran	69
K. Keterbatasan Penelitian	69
BAB 6 ANALISIS PENGENAAN CUKAI SEBAGAI INSTRUMEN DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS ATAS PENGGUNAAN MICROBEADS SEBAGAI BAHAN BAKU PRODUK KECANTIKAN DALAM INDUSTRI KECANTIKAN DI INDONESIA	75
A. Pengenaan Cukai <i>Microbeads</i> Sebagai Bahan Baku Produk Kecantikan di Indonesia	75
B. Eksternalitas Negatif.....	77
C. Cukai	77
D. Urgensi Pengenaan Cukai Atas Bahan <i>Microbeads</i> Dalam Produk Kosmetik	77
E. Aturan Pelarangan Penggunaan <i>Microbeads</i> di Negara Lain	81
F. Menakar Model Pungutan Cukai <i>Microbeads</i> di Indonesia	82
G. Kesimpulan	84
BAB 7 TOURISM TAX: POTENSI DAN SOLUSI JAGA SURGA ALAM INDONESIA	89
A. Kebijakan Fiskal Kaitannya Dengan Potensi Wisata di Indonesia.....	89
B. Pajak Lingkungan (<i>Green Tax</i>)	91
C. Pajak Pariwisata (<i>Tourism Tax</i>).....	92
D. Regulasi <i>Green Tax</i> di Indonesia.....	92
E. Penerapan <i>Green Tax</i> di Indonesia.....	93
F. Studi Komparatif <i>Tourism Tax</i> Dari Berbagai Negara	94
G. Potensi Penerapan <i>Tourism Tax</i> di Indonesia	96
H. Kesimpulan	98
BAB 8 MENINJAU FISIBILITAS PENGENAAN PAJAK ATAS SAMPAH MAKANAN DI INDONESIA: SUATU GAGASAN DALAM MENGURANGI EMISI KARBON	103
A. Pengenaan Pajak Atas Sampah Makanan Indonesia Untuk Mengurangi Emisi Karbon.....	103
B. Kebijakan Pajak.....	106
C. Fungsi Pajak	106
D. Eksternalitas Negatif.....	106
E. Pigouvian Tax.....	106
F. <i>Pay As You Throw</i> (PAYT).....	107
G. Menemukan Instrumen Fiskal Dalam Upaya Mengurangi Sampah Makanan	107
H. Menentukan Desain Kebijakan Pajak Atas Sampah	108

I.	<i>Benchmarking</i> Penerapan Pajak Sampah Makanan di Negara Lain	110
J.	Meninjau Fisibilitas Pengenaan Pajak Atas Sampah di Indonesia	112
K.	Kesimpulan	115
BAB 9 CARBON TAX REFORM: IMPLEMENTASI PAJAK DALAM MEMBANGUN GREEN INDUSTRY UNTUK GLOBAL NET ZERO EMISSION 2050.....		
A.	Pajak Dalam <i>Green Industry</i>	121
B.	Emisi Karbon	123
C.	Pajak Karbon	123
D.	<i>Green Industry</i>	124
E.	Regulasi <i>Carbon Tax Reform</i> di Indonesia Dalam Mencapai <i>Green Industry</i>	125
F.	Pengenaan Pajak Dapat Menjadi <i>Win-Win Solution</i>	126
G.	Kebijakan Pajak Karbon Saat Terjadi Kelumpuhan Ekonomi	127
H.	Kesimpulan	128
BAB 10 EVALUASI PENERAPAN CARBON PRICING SCHEME DAN REDD+ SCHEME DALAM MENGEJAR NET ZERO EMISSION DI INDONESIA		
A.	Penerapan <i>Carbon Pricing</i> dan <i>Redd+ Scheme</i> di Indonesia	135
B.	Pajak Karbon	136
C.	Perdagangan Karbon Wajib	137
D.	Perdagangan Karbon Sukarela	137
E.	Analisis Penerapan <i>Carbon Pricing</i> dan <i>Redd+ Scheme</i> di Indonesia	138
F.	Kesimpulan	141



OPTIMALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK Mendukung TERCAPAINYA *NET ZERO EMISSION 2050* DAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

[Nadia Az-Zahra Prabawati], [Lidya Meina Chairunnisa],
[Nabela Suspa Deya]
nadiaazzahraprabawati@gmail.com

A. EMISI KARBON DAN KENDARAAN BERMOTOR

Kualitas udara di Indonesia terpantau tengah mengalami penurunan (CNN Indonesia, 2023). Pada Juni 2023, Indonesia menjadi negara di Asia Tenggara dengan tingkat polusi udara paling buruk. Penurunan kualitas udara di Indonesia juga tercermin dari laporan IQAir yang memaparkan bahwa indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 170 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 (CNN Indonesia, 2023). Bahkan, pada bulan Juni 2023, Jakarta telah beberapa kali menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia (BBC Indonesia, 2023).

Di sisi lain, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi pencemaran udara, salah satunya melalui ratifikasi *Paris Climate Agreement*. Pada ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki target untuk *mencapai Net Zero Emissions 2050* (NZE 2050) dengan mengurangi jumlah karbon yang dihasilkan dari aktivitas manusia serta mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. Target tersebut juga selaras dengan cita-cita Indonesia dalam memenuhi target pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan

DAFTAR PUSTAKA

(Buku)

- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press. Malang.
- Gruber, J. 2010. *Public Finance and Public Policy (3rd ed.)*. Worth Publishers. New York.
- Rosdiana, Haula. 2014. *Pengantar Ilmu Pajak*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sunarto, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

(Artikel Jurnal)

- Bestari, L. R., Hidayat, A., dan Yani, M. 2014. Estimasi Nilai Pajak Kendaraan Solar Terkait Kerugian Pencemaran Udara (Studi Kasus: Metro Mini di DKI Jakarta). *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan (JAREE)*. 2. hh. 98–111.
- De Borger, Bruno & Mayeres, Inge. 2007. Optimal Taxation of Car Ownership, Car Use and Public Transport: Insights Derived From a Discrete Choice Numerical Optimization Model. *European Economic Review*. 51(5). hh.1177-1204.
- Haryanto, B. 2018. Climate Change and Urban Air Pollution Health Impacts in Indonesia. *In Climate Change and Air Pollution*. hh.215-239.
- Lazuardi, M. H. 2021. Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor, Dikaji dari Prinsip Pencemar Membayar. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 7(2). hh. 171-196.
- Septi Maulia Fitriastuti. 2014. STUDI PENERAPAN EARMARKING TAX PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT PEMELIHARAAN JALAN DI KABUPATEN XXX PROVINSI JAWA TIMUR. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. 3(1). hh 1-23.

(Peraturan Pemerintah)

- Indonesia. 2017. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*. Jakarta.

(Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

- Anggraini, F. 2010. *Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Account Reprsentative dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Wajib Pajak*. Tesis. Universitas Indonesia. Depok.

- Rakhmawati, A. 2017. ANALISIS VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI KEPEMILIKAN MOBIL PRIBADI PADA KALANGAN DOSEN DI FEB-UB. *Tesis*. Univesitas Brawijaya. Malang.
- Setyonugroho, L. 2017. *Analisis Pajak Pigouvian pada Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Universitas Indonesia. Depok.

(Undang-Undang)

- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 130. Sekretariat Negara. Jakarta.

(Website)

- Adani, M. A. 2022. PKB untuk Mengatasi Eksternalitas Negatif Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. PKB untuk Mengatasi Eksternalitas Negatif Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta | kumparan.com. dilihat 15 Agustus 2023.
- Ahmad, Arif. 2023. Polusi Udara di Indonesia Terburuk di Asia Tenggara. Polusi Udara di Indonesia Terburuk di Asia Tenggara - Kompas.id. dilihat 19 Agustus 2023.
- Almira, B dan Ceacilia, K. 2022. Mengulas Pajak Kendaraan Bermotor: Apakah Selaras dengan Konsep Pajak Lingkungan?. Mengulas Pajak Kendaraan Bermotor: Apakah Selaras Dengan Konsep Pajak Lingkungan? - HnG Consulting. dilihat 16 Agustus 2023.
- Bappeda DIY Yogyakarta. 2014. POLUSI UDARA DAN UJI EMISI GAS BUANG KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI PRASYARAT PEMBERIAN PERPANJANGAN STNK. polusi udara dan uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai prasyarat pemberian perpanjngn stnk. dilihat 19 Agustus 2023.
- BBC Indonesia. 2023. Kualitas udara DKI Jakarta Disebut Sudah 'Sangat Krisis', Pemprov Siapkan Razia Uji Emisi Polusi udara Jakarta sudah “sangat krisis”, Pemprov DKI siapkan razia uji emisi kendaraan - BBC News Indonesia. dilihat 19 Agustus 2023.
- Chantanusornsiri, W. 2021. Excise considers carbon tax. Excise considers carbon tax. dilihat 17 Agustus 2023.
- CNN Indonesia. 2023. ESDM: Populasi Motor 120 Juta Unit, Sembur Emisi 300 Kg per Hari. ESDM: Populasi Motor 120 Juta Unit, Sembur Emisi 300 Juta Kg per Hari. dilihat 17 Agustus 2023.

- CNN Indonesia. 2023. Pemerintah Ungkap Kualitas Udara Sepanjang 2022 Turun di 57 Daerah. Pemerintah Ungkap Kualitas Udara Sepanjang 2022 Turun di 57 Daerah. dilihat 19 Agustus 2023
- Fauzan, R. 2022. Tunggakan Pajak Kendaraan Rp100 Triliun, Ini Data Jumlah Mobil dan Motor di RI. Tunggakan Pajak Kendaraan Rp100 Triliun, Ini Data Jumlah Mobil dan Motor di RI (bisnis.com). dilihat 18 Agustus 2023.
- Fuelsandlubes.com. 2013. Thailand to tax vehicles based on CO2 emissions by 2016. Thailand to tax vehicles based on CO2 emissions by 2016 - F&L Asia. dilihat 18 Agustus 2023.
- Kagan, J. 2020. Pigovian Tax. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/p/pigoviantax.asp>. dilihat 15 Agustus 2023.
- Kementerian PPN/Bappenas. Sekilas SDGs. Sekilas SDGs (bappenas.go.id). dilihat 15 Agustus 2023.
- Lifestylegroup.es. 2015. Vehicle Tax in Spain. Vehicle Tax in Spain. dilihat 18 Agustus 2023.
- Mutia, Annissa. 2022. 10 Negara Penyumbang Emisi Karbon Terbesar di Dunia, Ada Indonesia! .10 Negara Penyumbang Emisi Karbon Terbesar di Dunia, Ada Indonesia!. dilihat 15 Agustus 2023.
- Noorca, D. 2023. Pajak Progresif Tidak Serta Merta Membuat Orang Batal Beli Kendaraan. Pajak Progresif Tidak Serta Merta Membuat Orang Batal Beli Kendaraan - Suara Surabaya. dilihat 15 Agustus 2023.
- Paultan.org. 2015. New CO2-based car taxation scheme to net Thai government up RM1.2 bil in additional tax revenue. New CO2-based car taxation scheme to net Thai government up to RM1.2 bil in additional tax revenue - paultan.org. dilihat 17 Agustus 2023.
- Transport and Environment. 2019. How Vehicle Taxes Can Accelerate Electric Car Sales.2019_02_How_vehicle_taxes_can_accelerate_electric_car_final.pdf(transportenvironment.org). dilihat 19 Agustus 2023.
- United Nations Development Programme. The SDGs In Action. Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme (undp.org). dilihat 15 Agustus 2023.



STRATEGI PENERAPAN INSENTIF PAJAK BANGUNAN HIJAU UNTUK MENGURANGI EMISI KARBON DI INDONESIA

[Andreas Pandu Prasetya], [Kharissima Ndaru Amallia],
[Revinsya Amrizal]
andreaspandu@student.ub.ac.id

A. INSENTIF PAJAK BANGUNAN HIJAU DAN EMISI KARBON DI INDONESIA

Perubahan iklim secara global telah diakui menjadi salah satu ancaman dan kekhawatiran paling serius di abad ke-21. Penanggulangan secara global atas ancaman degradasi kualitas lingkungan akibat perubahan iklim menjadi langkah awal untuk mencapai *Sustainable Development Goals* poin ke 13 yaitu tentang penanganan perubahan iklim. Penanganan tersebut membutuhkan peran dan keterlibatan pemerintah secara global yang telah dibuktikan dengan penandatanganan *Nationally Determined Contributions* (NDC) dalam *Paris Agreement* 2018 oleh 136 negara tentang komitmen pengurangan emisi karbon secara global. Perjanjian NDC menyetujui bahwa salah satu faktor penyumbang emisi karbon di dunia adalah dari tingginya jumlah pembangunan gedung (Fan & Hui, 2020) dan real estate (Wahyuningsih *et al.*, 2022). Hal tersebut dibuktikan bahwa 40% emisi karbon global dikontribusikan oleh emisi real estate (Carlin, 2022) yang secara kontinu mengalami kenaikan dalam beberapa tahun terakhir (Fan & Hui, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Amaripadath, D., Rahif, R., Zuo, W., Velickovic, M., Voglaire, C., & Attia, S. (2023). Climate change sensitive sizing and design for nearly zero-energy office building systems in Brussels. *Energy and Buildings*, 286, 112971. <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.112971>
- Azis, A., & Shareena, S. (2017). Property tax assessment incentive model for green building initiative in Malaysia.
- Basten, V., Berawi, M. A., Latief, Y., & Créviets, I. (2018). Building Incentive Structure in the Context of Green Building Implementation: From the Local Government Perspective. *Journal of Design and Built Environment*, 18(2), 37–45. <https://doi.org/10.22452/jdbe.vol18no2.4>
- Carlin, D. (2022). *40% Of Emissions Come From Real Estate; Here's How The Sector Can Decarbonize.* Forbes. <https://www.forbes.com/sites/davidcarlin/2022/04/05/40-of-emissions-come-from-real-estate-heres-how-the-sector-can-decarbonize/>
- Deviantari, U. W., & Kurniawan, A. (2022). Literatur Review: Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Perkotaan. *Geoid*, 17(2), 260. <https://doi.org/10.12962/j24423998.v17i2.11341>
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9 (2), 108-124. <http://dx.doi.org/10.36080/jem.v9i2.1248>
- Ding, A., Lee, R. H., Legendre, T. S., & Madera, J. (2022). Anthropomorphism in hospitality and tourism: A systematic review and agenda for future research. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 52, 404–415. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2022.07.018>
- Fan, K., & Hui, E. C. M. (2020). Evolutionary game theory analysis for understanding the decision-making mechanisms of governments and developers on green building incentives. *Building and Environment*, 179, 106972. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.106972>
- Fan, K., & Wu, Z. (2020). Incentive mechanism design for promoting high-level green buildings. *Building and Environment*, 184, 107230. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107230>
- McCluskey, W. J., Cornia, G. C., & Walters, L. C. (Eds.). (2013). *A primer on property tax: Administration and policy.* Wiley.

- Putra, E., & Lutfi, A. (2021). Strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Rangka Pengendalian Ruang Terbuka Hijau Melalui PBB-P2. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 672. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2195>
- Putri, A. M. H. (2023, May). *Termasuk Indonesia, Ini Negara Penyumbang Polusi Terbesar*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230525072754-128-440369/termasuk-indonesia-ini-negara-penyumbang-polusi-terbesar>
- Olubunmi, O. A., Xia, P. B., & Skitmore, M. (2016). Green building incentives: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 59, 1611–1621. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.028>
- Ragheb, A., El-Shimy, H., & Ragheb, G. (2016). Green Architecture: A Concept of Sustainability. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 216, 778–787. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.075>
- Rana, A., Sadiq, R., Alam, M. S., Karunathilake, H., & Hewage, K. (2021). Evaluation of financial incentives for green buildings in Canadian landscape. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 135, 110199. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110199>
- Safitra, D. A., & Suheri, A. (2022). Insentif Pajak Properti Atas Bangunan Hijau: Sebuah Studi Komparasi. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 331–342. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1488>
- Shazmin, S. A. A., Sipan, I., & Sapri, M. (2016). Property tax assessment incentives for green building: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 60, 536–548. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.081>
- Shazmin, S. A. A., Sipan, I., Sapri, M., Ali, H. M., & Raji, F. (2017). Property tax assessment incentive for green building: Energy saving based-model. Dalam *Energy* (Vol. 122, hlm. 329–339). <https://doi.org/10.1016/j.energy.2016.12.078>
- Sivadasan, R., Quoquab, F., Mohammad, J., & Basiruddin, R. (2020). Residential properties with green living concept: What drives consumers to buy? *International Journal of Ethics and Systems*, 36(3), 427–447. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2020-0042>
- Wahyuningsih, R. D., Muyassaroh, N., & Eka, M. F. (2022). *Kajian Penerapan Insentif Pajak Green Building Pada Sektor Real Estate dalam Rangka Akselerasi SDGs di Indonesia*. 2(1).
- Wardana, D.F., & Astuti, W. (2020). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Usaha Mikro Kelas Menengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kota Surakarta. *Jurnal Discretie*, 1 (3), 202-209. <https://doi.org/10.20961/jd.v1i3.50267>

Widiati, I. R. (2019). *Tinjauan studi analisis komparatif bangunan hijau (green building) dengan metode asesmen sebagai upaya mitigasi untuk pembangunan konstruksi yang berkelanjutan. Konferensi Nasional Pascasarjana Teknik Sipil (KNPTS) X 2019, 69-76*



CARBON TAX SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENDORONG *GREEN BEHAVIOUR* PADA INDUSTRI *FASHION*

[Nafarida Santika Rahma] dan [Ayun Hanafiyah]
nafaridasantika@student.ub.ac.id

A. MODERNITAS DAN CARA BERPAKAIAN

Modernitas menjadi fenomena perubahan sosial terutama tata cara berpakaian (*fashion*) masyarakat di Indonesia. Pertumbuhan tren mode yang kian cepat mengakibatkan transformasi dalam masyarakat secara signifikan (BBC, 2022). Salah satunya pada sektor industri *fashion* yang silih berganti menimbulkan fenomena *fast fashion*. Menurut Choy (2014) *fast fashion* merupakan tren industri dengan mempersingkat *lead time* dan *fast offer* produk ke pasar. Setiap industri mendukung tren tersebut dengan kompetitif untuk memproduksi pakaian musiman versi terbaiknya (Pratama, 2022).

Industri *fashion* mengeluarkan berbagai jenis pakaian menggunakan bahan berkualitas rendah dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat (Zero Waste Indonesia, 2023). Realitanya pakaian tersebut sering tersisa di gudang industri akibat tidak laku terjual ke konsumen. Menurut laporan Ellen MacArthur Foundation (2017), lebih dari 50% pakaian *fast fashion* dibuang dalam satu tahun setelah diproduksi (Nidia & Suhartini, 2020). Selain itu, pembuangan pakaian berbahan tekstil mencapai 11,3 juta ton menimbulkan penurunan kualitas tanah (Young *et al.*, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Anguelov, N. 2015. *The Dirty Side Of The Garment Industry: Fast Fashion And Its Negative Impact On Environment And Society*. CRC Press.
- Annamma, J. J., Sherry, J., Alladi, V., Jeff, W., & Ricky, C. 2012. *Fast Fashion, Sustainability, and the Ethical Appeal of Luxury Brands*. *Fashion Theory*. hh. 273-295
- Arsetyaji, S. A., Widowati, W., & Mandasari, A. 2021. Kelayakan Produk Lenan Rumah Tangga dari Limbah Tekstil dengan Teknik Paquiw. *Fashion and Fashion Education Journal*. 10(1). hh. 13-18.
- Ayodele, O. F., Ayodele, B. V., Mustapa, S. I. and Fernando, Y. 2021. *Effect of activation function in modeling the nexus between carbon tax, CO2 emissions, and gas-fired power plant parameters*. *Energy Conversion and Management*: X. 12.
- Baranzini, A. & Carattini, S. 2017. *Effectiveness, earmarking and labeling: testing the acceptability of carbon taxes with survey data*. *Environmental Economics and Policy Studies*. 19. hh. 197-227.
- BBC. 2022. Bagaimana kita bisa memperbaiki efek buruk 'fast fashion'?. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgnlzvzk0eo>. Dilihat 14 Agustus 2023.
- Bick, R., Halsey, E. and Ekenga, C. C. 2018. *The global environmental injustice of fast fashion*. *Environmental Health*. 17. hh. 1-4.
- Caro, F., & Martínez-de-Albéniz, V. 2015. *Fast fashion: Business model overview and research opportunities*. *Retail supply chain management: Quantitative models and empirical studies*. hh. 237-264.
- Choy, T. M. 2013. *Fast Fashion Systems: Theories And Applications*.
- CNBC Indonesia. 2022. Tak Terduga! Jutaan Limbah Tekstil Ternyata Berasal Dari Sini. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221019164842-4-381003/tak-terduga-jutaan-limbah-tekstil-ternyata-berasal-dari-sini>. Dilihat 11 Agustus 2023.
- De Bruin, K. & Yakut, A. M. 2023. *The Impacts of Removing Fossil Fuel Subsidies and Increasing Carbon Taxation in Ireland*. *Environmental and Resource Economics*. hh. 1-42.
- Dilasari, A. P., Ani, H. N. & Rizka, R. J. H. 2023. Analisis Best Practice Kebijakan Carbon Tax Dalam Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon Di Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*. 7(1). hh. 184-194.

- DJP. 2021. Menilik Pajak Karbon di Indonesia. <https://stats.pajak.go.id/index.php/id/artikel/menilik-pajak-karbon-di-indonesia>. Dilihat 13 Agustus 2023.
- Fadillah, M. & Imperiani, E. D. 2020, April. An Analysis of Non-Observeance Maxims in Customs Protection. In Twelfth Conference on Applied Linguistics (CONAPLIN 2019). hh. 129-133
- Fatkhudin, M., I. 2017. Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kinerja Lingkungan, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. hh. 1-125.
- Fremstad, A. & Paul, M. 2019. The impact of a carbon tax on inequality. *Ecological Economics*. 163. hh. 88-97.
- Hájek, M., Zimmermannová, J., Helman, K. & Rozenský, L. 2019. Analysis of carbon tax efficiency in energy industries of selected EU countries. *Energy Policy*. 134. Harjadi, C. 2023. Mengenal Fast Fashion, Tren Berpakaian Populer di Indonesia. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/07/14/mengenal-fast-fashion-indonesia>. Dilihat 14 Agustus 2023.
- Harun, F. 2022. Strategi The UN Alliance for Sustainable Fashion Dalam Mendorong Industri Fashion yang Berkelanjutan di Bangladesh. Skripsi. Universitas Bosowa.
- Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). 2022. Fast Fashion Waste, Limbah yang Terlupakan. <https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/fast-fashion-waste-limbah-yang-terlupakan/>. Dilihat 14 Agustus 2023.
- Kementerian Keuangan. 2022. Ini Komitmen Indonesia Mencapai Net Zero Emission. Ini Komitmen Indonesia Mencapai Net Zero Emission (kemenkeu.go.id). Dilihat 15 Agustus 2023.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2022. Nilai Ekonomi Bilateral Indonesia-AS Lampau \$90 Triliun. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2363/nilai-ekonomi-bilateral-indonesia-as-lampau-90-triliun>. Dilihat 14 Agustus 2023.
- Kompas. 2022. Jangan Cuma Belanja Pakaian, Ketahui Juga Dampak Fast Fashion pada Lingkungan. Jangan Cuma Belanja Pakaian, Ketahui Juga Dampak Fast Fashion pada Lingkungan Halaman all - Kompas.com. Dilihat 14 Agustus 2023.
- Köppl, A. & Schratzenstaller, M. 2022. Carbon taxation: A review of the empirical literature. *Journal of Economic Surveys*.
- Kumala, R., Ulpa, R. & Rahayu, A. 2021. Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi. In *Prosiding Seminar STIAMI*. 8(1), hh. 66-73.

- Kurniati, D. (2021). Skema Cap & Tax dalam Pengenaan Pajak Karbon Dinilai Tepat, <https://news.ddtc.co.id/skema-cap--tax-dalam-pengenaan-pajak-karbon-dinilai-tepat-33523>. Dilihat 15 Agustus 2023.
- Kusumabangsa, G. 2022. Evaluation of Vat Collection on Imported Digital Product and Service through E-Commerce: Tax Authority Perceptions. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. 5(1). hh. 291-303.
- Li, X., Du, J & Long, H. 2019. Green Development Behavior and Performance of Industrial Enterprises Based on Grounded Theory Study: Evidence from China.
- Looka Green. 2023. Fast Fashion Menjadi Ancaman Pada Lingkungan. <https://lokagreen.id/2023/06/30/fast-fashion-menjadi-ancaman-pada-lingkungan/>. Dilihat 14 Agustus 2023.
- Margono, M., Sudarmanto, K., Sulistiyani, D. & Sihotang, A. P. 2022. Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon Dalam Peraturan Perpajakan. *Tinjauan Hukum Jurnal USM*. 5(2), hh. 767-781.
- Maxim, A., Jijie, D. T. & Roman, T. 2022. *Why Are Households Willing to Pay for Renewable Energy? Lessons From Romania*. *Frontiers in Environmental Science*. 10.
- Maxim, M. & Zander, K. 2019. *Can a green tax reform entail employment double dividend in European and non-European countries? A survey of the empirical evidence*. *International Journal of Energy Economics and Policy*. 9(3). hh. 218- 228.
- Maxim, M. R. & Zander, K. 2020. *Green Tax Reform and Employment Double Dividend in Australia Should Australia Follow Europe's Footsteps? A CGE Analysis*. *Margin: The Journal of Applied Economic Research*. 14(4). hh. 454- 472.
- Maxim, M. R. 2021. *Green Tax Reform in Australia and the Possibilities of Double and Triple Dividends (Doctoral dissertation, Charles Darwin University (Australia))*.
- Mohd Jamel, N. E. S., Hamid, N. A., Mohd Zawawi, S. N. H., Othman, R. D. & Sulaiman, S. 2021. *The role of tax authorities in public acceptance of indirect tax in Malaysia*. *Jurnal Intelek*. 16(1). hh. 233-243.
- Nidia, C. & Suhartini, R. 2020. Dampak Fast Fashion dan Peran Desainer Dalam Menciptakan Sustainable Fashion. *Edisi Yudisium Periode Agustus*. 9(2). hh. 157-166.
- Nur, N. A. 2022. Menuju Circular Fashion: Perlunya Regulasi dan Penguatan Kerjasama. Menuju Circular Fashion: Perlunya Regulasi dan Penguatan Kerjasama – CWTS Pusat Studi Perdagangan Dunia (ugm.ac.id). Dilihat 16 Agustus 2023.

- Parchet, R. 2019. *Are Local Tax Rates Strategic Complements Or Strategic Substitutes?. American Economic Journal: Economic Policy.* 11(2). hh. 189- 224.
- PI, T. B. 2021. *Konsep Industri Fast Fashion di Indonesia Dalam Tinjauan Etika Lingkungan Hidup Biosentrisme.* Dissertation. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Pramudita, G. & Okfitasari, A. 2022. Analisis perbandingan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi.* 2(2). hh. 24-32.
- Pratama, B. A., Ramadhani, M. A., Lubis, P. M., & Firmansyah, A. 2022. Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia: Potensi Penerimaan Negara Dan Penurunan Jumlah Emisi Karbon. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review).* 6(2). hh. 368- 374.
- Purwanto, A. 2022. *Industri Tekstil dan Produk Tekstil: Sejarah, Potret, Tantangan, dan Kebijakan.* <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/05/09/industri-tekstil-dan-produk-tekstil-sejarah-potret-tantangan-dan-kebijakan>. Dilihat 15 Agustus 2023.
- Putra, J. J. H., Nabilla, N. and Jabanto, F. Y. 2021. *Comparing" carbon tax" and" cap and trade" as mechanism to reduce emission in Indonesia.* *International Journal of Energy Economics and Policy.* 11(5). hh. 106-111.
- Rostiani, R. & Kuron, J. 2019. *Purchase of Fast-Fashion by younger Consumers in Indonesia: Do we like it or do we have to like it?. Journal of Indonesian Economy and Business: JIEB.* 34(3). hh. 249-266.
- Salim, A. & Sidiq, M. 2022. Dampak Pajak Karbon Terhadap Kelangsungan Bisnis. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan.* 3 (1). hh. 74-81.
- Salleh, M. C. M., Yussof, S. A. & Abdullah, N. I. 2018. *Impact Of The Government Service Tax (GST) On The Malaysian Takaful Industry: Issues And Challenges.* *Advanced Science Letters.* 24(5) hh. 3178-3183.
- Sekyewa, E, R. 2022. *Uganda now taxes imported clothes at 35%, and local manufacturers see big opportunity.* <https://www.mainstreamug.com/economy/2022/04/uganda-now-taxes-imported-clothes-at-35-and-local-manufacturers-see-big-opportunity.html>. Dilihat 6 Agustus 2023.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D/Sugiyono.* Alfabeta. Bandung.
- Thabrani, G. 2021. *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* <https://serupa.id/teknik-analisis-data-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/>. Dilihat 13 Agustus 2023.

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. 5 Agustus 2007. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 23 September 2008. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 15 Oktober 2009. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 7 Oktober 2021. Jakarta.
- Universitas Gajah Mada. 2020. Fast Fashion: Banyak Faedah. <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/08/25/fast-fashion-banyak-masalah-nihil-faedah/>. Dilihat 14 Agustus 2023.
- Wandari, N. K. M. A., and Darma, G. S. 2021. Pengelolaan Karakter Green-Behavior Pada Generasi Milenial Dalam Meningkatkan Minat Penggunaan Green- Product. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*. 6(1), hh. 49-61.
- Young, B., Ingwersen, W. W., Bergmann, M., Hernandez-Betancur, J. D., Ghosh, T., Bell, E. & Cashman, S. 2022. *A system for standardizing and combining us environmental protection agency emissions and waste inventory data. Applied Sciences*. 12(7).
- Zero Waste Indonesia. 2023. Mengenal Fast Fashion dan Dampak yang Ditimbulkan. <https://zerowaste.id/zero-waste-lifestyle/mengenal-fast-fashion-dan-dampak-yang-ditimbulkan/>. Dilihat 14 Agustus 2023



MENCAPAI *NET ZERO* EMISSION 2050 MELALUI INSENTIF FISKAL ATAS PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK

[M. Ancilla Sonia P. A], [Elfira Andara A], [Jessyca Wulandari]
maria.ancilla@ui.ac.id

A. *NET ZERO EMISSION* DAN INSENTIF FISKAL PEMBANGUNAN STASIUN KENDARAAN LISTRIK

Dengan mengonsumsi lebih dari 80% energi dunia, negara-negara G20 memiliki peran penting dalam mengupayakan penurunan emisi karbon guna menekan pemanasan global (D’Orazio, 2022, hlm. 135). Melalui dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC), emisi karbon dunia diproyeksikan berada pada posisi 6,9 ton karbon dioksida ekuivalen per kapita pada tahun 2030 (Databoks, 2022). Indonesia kemudian menetapkan target pengurangan emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% jika ada kerjasama internasional per tahun 2030 melalui Perjanjian Paris yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016. Target tersebut kemudian ditingkatkan pada September 2022 menjadi 31,89% dan 43,2% (EBTKE, 2023). Penurunan emisi karbon ini akan dicapai melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, serta pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdellatif, M. M., Eid, A. G., & Abdel-Salam, A. S. G. (2021). The relevance of supply side taxation for attracting foreign direct investment to developing countries: evidence from Egypt. *EJournal of Tax Research*, 19(1), 1–16.
- Ahdiat, A. (2023, April 18). Tren Penjualan Mobil Listrik Menguat pada Kuartal I 2023. *Katadata*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/18/tren-penjualan-mobil-listrik-menguat-pada-kuartal-i-2023>
- Asaad, M. I. (2020). Road Map Pengembangan Infrastruktur Kendaraan Listrik 2020 - 2024. In *Roadmap infrastruktur kendaraan elektrik*. shorturl.at/jxHLM
- Badan Kebijakan Fiskal. (2019). *Laporan Belanja Perpajakan Tahun 2018*.
- Damrongraktam, I. (2022). *BOI Investment Policy on EVs*.
[https://www.boi.go.th/upload/content/05.18.2022 - BOI EV ppt.pdf](https://www.boi.go.th/upload/content/05.18.2022-BOI%20EV%20ppt.pdf)
- Easson, A. J. (2004). *Tax Incentives for Foreign Direct Investment*.
- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). Tinjauan Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Fungsi Budgetair Dan Regulerend Pajak. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6743>.
- Government of Bermuda. (2018). *Duty-Free Parts for Electric Vehicle Charging Stations and Accessories*.
- Horton, M., & El-Ganainy, A. (2019). Fiscal Policy: Taking and Giving Away. *Imf*.
[https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/Fiscal- Policy](https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/Fiscal-Policy)
- House, C. L., & Shapiro, M. D. (2008). Temporary Investment Tax Incentives: Theory with Evidence from Bonus Depreciation. *American Economic Review*, 98(3).
<https://www.aeaweb.org/articles/pdf/doi/10.1257/aer.98.3.737>
- Kementerian ESDM. (2020). *Pemerintah Percepat Infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik*. [https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-percepat- infrastruktur-kendaraan-bermotor-listrik-1](https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-percepat-infrastruktur-kendaraan-bermotor-listrik-1)

- Mohammad, R., Helmi Zus Rizal, & Gede Satria Pujanggo, PG. (2021). Efek Insentif Perpajakan Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Ekonomi Secara Makro: Studi Kasus Indonesia. *Scientax*, 2(2), 179–198. <https://doi.org/10.52869/st.v2i2.91>
- Mustajab, R. (2023). Penjualan Mobil Listrik Indonesia Melonjak pada Semester I/2023. *DataIndonesia*. Ridhwan Mustajab%0A%0A%0A%0AArtikel ini telah tayang di DataIndonesia.id dengan judul%0A%0A%22Penjualan Mobil Listrik Indonesia Melonjak pada Semester I/2023%22.,%0AAuthor: Ridhwan Mustajab.%0AEditor: Dimas Bayu.%0AKlik selengkapnya di sini: <https://dataIndonesia.id>
- News, R. D. (2021, July 29). PPh Final 0% Sewa Bangunan Penanganan Covid-19 Sampai 31 Desember 2021. *DDTCNews*. <https://news.ddtc.co.id/pph-final-0-sewa-bangunan-penanganan-covid-19-sampai-31-desember-2021-31599>
- Panion. (2023). *EV incentives 2023: These 6 countries promote e-mobility the most*. <https://www.panion.org/ev-incentives-2023-these-6-countries-promote-e-mobility-the-most/>
- PLN. (2023). *Sinergi PLN dan Himbara Dalam Pembiayaan, Mudahkan Masyarakat Beli Motor Listrik*. <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2023/06/sinergi-pln-dan-himbara-dalam-pembiayaan-mudahan-masyarakat-beli-motor-listrik>
- Priyantoro, D. D. (2023). Jumlah SPKLU Kendaraan Listrik di Indonesia Masih Terbatas. *Kompas*. <https://otomotif.kompas.com/read/2023/08/03/183100215/jumlah-spklu-kendaraan-listrik-di-indonesia-masih-terbatas>
- Retnowati, E. (2020). Pemerintah Siapkan Anggaran Rp352 Triliun untuk Subsidi Bunga UMKM. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/20980/Pemerintah-Siapkan-Anggaran-Rp352-Triliun-untuk-Subsidi-Bunga-UMKM.html>
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2014). *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Santos, G., & Davies, H. (2020). Incentives for quick penetration of electric vehicles in five European countries: Perceptions from experts and stakeholders. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.10.034>
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), & ASEAN Secretariat. (2022). *ASEAN Investment Report 2022 Pandemic Recovery and Investment Facilitation* (Issue October).

Widi, S. (2023). Indonesia Punya 588 SPKLU untuk Mobil Listrik per Desember 2022. *Data Indonesia*. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/indonesia-punya-588-spklu-untuk-mobil-listrik-pada-2022>



PENGENDALIAN KONSUMSI DENGAN PENGENAAN CUKAI BBM DALAM RANGKA MENEKAN EMISI KARBON

[Aji Widya Firmansyah], [Alfian Royvaldo Aryo Wibowo],
[Yesika Suryani]
Ajiwidya3@gmail.com

A. CUKAI BBM UNTUK MENEKAN EMISI KARBON

Dewasa ini, perubahan iklim merupakan isu krusial yang menjadi perhatian global. Salah satu penyebabnya adalah emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Problematika emisi kendaraan erat kaitannya dengan bahan bakar minyak (BBM) yang juga menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) (Pratama, 2019). Hal ini didorong dengan pesatnya jumlah kendaraan berbahan bakar minyak di Indonesia yang dapat meningkatkan gas buangan sehingga berdampak pada pemanasan global (Ghaniyyu & Husnita, 2021).

Jenis Kendaraan Bermotor	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit)		
	2019	2020	2021
Mobil Penumpang	15 592 419	15 797 746	16 413 348
Mobil Bis	231 569	233 261	237 566
Mobil Barang	5 021 888	5 083 405	5 299 361
Sepeda motor	112 771 136	115 023 039	120 042 298
Jumlah	133 617 012	136 137 451	141 992 573

Gambar 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia dari Tahun 2019-2021
Sumber: BPS, 2022

DAFTAR PUSTAKA

(Buku)

- Anjarwi, A.W. and SE, M., 2021. *Pajak Lalu Lintas Barang (Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai)*. Deepublish.
- Pigou, A. 2017. *The economics of welfare*. Routledge

(Artikel Jurnal)

- Aprill, E. P. 2019. The Private Foundation Excise Tax on Self-Dealing: Contours, Comparisons, and Character. *Pitt. Tax Rev.*, 17, hh. 297.
- Bental, B., & Brand, G. 2018. Economic developments in Israel: An overview. State of the Nation Report: Society, *Economy and Policy* 2018.
- Crossen, S., 2020. Excise taxation for domestic resource mobilization
- Cohen, E. 2023. INCREASING NUMBER OF VEHICLES AND THE SHORTAGE OF PARKING IN ISRAEL'S URBAN AREAS-ECONOMIC AND POLITICAL FACTORS. *Economics & Sociology*, 16(2), hh. 37-55.
- Drolsbach, C., Gail, M. M., & Klotz, P. A. (2022). Pass-through of temporary fuel tax reductions: Evidence from Europe. *Available at SSRN 4250210*.
- Ghaniyyu, F. F., & Husnita, N. 2021. Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), hh. 110-129.
- Harris, R. F., & Ramadhan, M. F. A. 2022. Formulasi yuridis terhadap urgensi perancangan kebijakan pajak karbon sebagai pendorong transisi energi baru terbarukan berdasarkan Pancasila. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), hh. 157- 171.
- Ida, Y., & Talit, G. 2018. What we can learn 17 years after the reform in public bus transportation in Israel. *Case Studies on Transport Policy*, 6(4), hh. 510-517.
- Jeanne, O., & Korinek, A. 2019. Managing credit booms and busts: A Pigouvian taxation approach. *Journal of Monetary Economics*, 107, hh. 2-17.
- Jenkins, N. R. 2015. The Determinants of Gasoline and Diesel Fuel Excise Tax Rates. *Undergraduate Economic Review*, 12(1), hh. 1.
- Khan, M. R. 2015. Polluter-pays-principle: The cardinal instrument for addressing climate change. *Laws*, 4(3), hh. 638-653.

- Kumar, P. G., Lekhana, P., Tejaswi, M., & Chandrakala, S. (2021). Effects of vehicular emissions on the urban environment-a state of the art. *Materials Today: Proceedings*, 45, hh. 6314-6320.
- Kurniawati, L. 2017. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Environmental Tax. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 1(2), hh. 57-66.
- Kusuma, Y. (2013). Pengaruh Bahan Bakar Pada Aktivitas Transportasi Terhadap Pencemaran Udara. *Sigma-MU*, 5(1), 88-101.
- Liu, X., Nassios, J., & Giesecke, J. 2022. *Oil Supply Shocks and Tax Policy Responses in Australia: Insights from a Dynamic CGE Framework* (No. g-336). Victoria University, Centre of Policy Studies/IMPACT Centre.
- Mounsey, S., Powell, L. M., & Chaloupka, F. J. 2022. The Labour Market Impact of Health Taxes. In *HEALTH TAXES: Policy and Practice* hh. 127-161.
- Oktaviastuti, B. 2017. Urgensi pengendalian kendaraan bermotor Di indonesia. *Rekayasa: Jurnal Teknik Sipil*, 2(1), hh. 5-8.
- Orzell, J., Krakowska, B., Stanimirova, I., & Daszykowski, M. 2019. Detecting chemical markers to uncover counterfeit rebated excise duty diesel oil. *Talanta*, 204, 229-237.
- Pratama, R., 2019. Efek rumah kaca terhadap bumi. *Buletin Utama Teknik*, 14(2), hh. 120- 126.
- Santos, G. 2017. Road fuel taxes in Europe: Do they internalize road transport externalities?. *Transport Policy*, 53, hh. 120-134.
- Santoso, R., 2017. Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia. *Kajian*, 21(3), hh. 201-219.
- Schwartz, P. 2018. The polluter-pays principle. In *Elgar Encyclopedia of Environmental Law* hh. 260-271.
- Setyawan, B., & Rahadi, Y. K. 2022. KAJIAN IMPLEMENTASI CARBON TAX SEBAGAI EKSTENSIFIKASI DI BIDANG CUKAI. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(2), hh. 386-408.
- Štreimikienė, D., & Baležentis, A. (2015). Assessment of willingness to pay for renewables in Lithuanian households. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 17, 515-531.
- Syarifudin, M., Fatah, K. M. A., & Dalimunthe, R. 2023. Analisis Konsumsi BBM dengan Variasi Lingkungan Operasi Kendaraan Bermotor Menuju Perilaku Eco-Drive. *Infotekmesin*, 14(1), hh. 23-27.

- Syrvacheva, E.A. and Kovaleva, A.G., 2020. Excise tax rates on fuel as an indicator of their environmental focus. *Язык в сфере профессиональной коммуникации*.— Екатеринбург, 2020, hh. 95-101.
- Tilton, J. E. 2016. Global climate policy and the polluter pays principle: A different perspective. *Resources Policy*, 50, hh. 117-118.
- West, R., & Brown, J. 2014. Electronic cigarettes: fact and faction. *British Journal of General Practice*, 64(626), hh. 442-443
- Witkin, N. 2019. A theory of impact bonds as an alternative to pigouvian tax and public provision: Application for climate change. *Journal of Applied Business & Economics*, 21(5), hh. 139-53.
- Zahar, A. 2018. Implementation of the polluter pays principle in China. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 27(3), hh. 293-305.
- Zimmer, A., & Koch, N. 2017. Fuel consumption dynamics in Europe: Tax reform implications for air pollution and carbon emissions. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 106, hh. 22-50.

(Website)

- Badan Pusat Statistik. 2022. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (Unit), 2019-2021. <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>. dilihat 10 Agustus 2023.
- Bundestag. 2022. Dreimonatige Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe verabschiedet. <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2022/kw20-de-energiesteuersenkungsgesetz-894664>. dilihat pada 15 Agustus 2023.
- Gazzettaufficiale. 2022. Misura urgente per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/sg>. dilihat pada 15 Agustus 2023.
- Iqair. 2022. Negara Paling Berpolusi di Dunia 2022. <https://www.iqair.com/id/world-most-polluted-countries>. dilihat pada 10 Agustus 2023.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2021. *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2021*. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-handbook-of-energy-and-economic-statistics-of-indonesia-2021.pdf>. dilihat pada 11 Agustus 2023.

Kurniawan. 2023. Jumlah Kendaraan di Indonesia 147 Unit, 87 Persen Motor.
<https://otomotif.kompas.com/read/2023/02/10/070200315/jumlah-kendaraan-di-indonesia-147-juta-unit-87-persen-motor>. dilihat 10 Agustus 2023.



ANALISIS PENGENAAN CUKAI SEBAGAI INSTRUMEN DALAM MENDUKUNG *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* GOALS ATAS PENGGUNAAN *MICROBEADS* SEBAGAI BAHAN BAKU PRODUK KECANTIKAN DALAM INDUSTRI KECANTIKAN DI INDONESIA

[Zella Alnahda] dan [Kayla Gitara]
zella.alnahda@ui.ac.id

A. PENGENAAN CUKAI *MICROBEADS* SEBAGAI BAHAN BAKU PRODUK KECANTIKAN DI INDONESIA

Industri kecantikan merupakan industri yang bergerak di bidang kosmetik, produk perawatan kulit (*skincare*) dan diri (*personal care*). Industri ini diperkirakan salah satu industri yang memiliki prospek pasar tinggi di masyarakat. Permintaan akan produk kecantikan pada masa pandemi Covid-19 menurut Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda meningkat melalui pengaruh influencer dalam menyebarkan informasi serta pangsa pasar. Selain itu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa industri kecantikan mengalami pertumbuhan mencapai 9,61% pada tahun 2021 serta peningkatan jumlah Perusahaan hingga 20,6% dimana didominasi sebesar 83% oleh pelaku UMKM. Dengan demikian, diketahui bahwa industri kecantikan memiliki potensi dan peluang yang besar serta mampu menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Hal ini juga

DAFTAR PUSTAKA

- Anagnosti, L., Varvaresou, A., Pavlou, P., Protopapa, E., & Carayanni, V. 2021. Worldwide actions against plastic pollution from microbeads and microplastics in cosmetics focusing on European policies. Has the issue been handled effectively? *Marina Pollution Bulletin*, 162, 1-15. doi:<https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111883>
- COSMOS-standard AISBL. 2023. *COSMOS Standard Criteria*. Belgium: Rue du Commerce 124.
- Crossen, S., & Sijbren, L. (1977). *Excise Systems: Global Study of The Selective Taxation Goods and Services*. London: The Johns Hopkins University Press
- Csorba, Magdalena, L., & Boglea, V. A. 2011. Sustainable cosmetics: A major instrument in protecting the consumer's interest. *Regional and Business Studies*, 3(1), 167-176.
- D'Amico, E. 2008. European Group Drafts Natural and Organic Cosmetics Standards. *Chemical Week*, 170, 31.
- Emma Watkins, J.-P. S. 2019. Policy approaches to incentivise sustainable plastic design. *OECD Environment Working Papers No. 149*.
- GESAMP. 2015. *Sources, Fate and Effects of Microplastics in The Marine Environment: A Global Assessment*. In: Kershaw PJ (ed) (IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP/UNDP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection).
- Handojo, A. 2023. *Perkembangan Industri Kecantikan (Bagian 1)*. Retrieved from daya: <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/pengembangan-diri/perkembangan-industri-kecantikan-bagian-1->
- Hutasoit, E. M., & Rosdiana, H. 2014. *Analisis Pengenaan Cukai atas Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- IISD. 2018. *UNEP, WRI Report Finds Regulations Focus on Plastic Bags, Overlook Microbeads*. Retrieved from IISD: <https://sdg.iisd.org/news/unep-wri-report-finds-regulations-focus-on-plastic-bags-overlook-microbeads/>
- Lassen, C., Hansen, S. F., Magnusson, K., Noren, F., Hartmann, N. I., Jensen, P. R., . . . Brinch, A. 2015. Microplastics: occurrence, effects and sources

- of releases to the environment in Denmark. *The Danish Environmental Protection Agency*. Hämtat från <http://www.eng.mst.dk/>
- Outsource. 2023. *COSMOS | Cosmetic Organic and Natural Standard*. Hämtat från Outsource: <https://outsource.contractlaboratory.com/cosmos-cosmetic-organic-natural-standard/#:~:text=The%20COSMOS%20marking%20on%20cosmetics%20packaging%20verify%20that,follow%20the%20requirements%20set%20by%20the%20COSMOS%20standard.>
- Qi, H., Zeng, S., Wang, Y., & Dong, X. 2022. Exploring The Discharge Characteristics of Personal Care Behaviors For High Precision Estimation of Microplastic Emission. *Journal of Environmental Management*, 312. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114917>
- Ratnawati, D. 2016. Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 1(2), 53-67.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shamdasani, Prem, Chon-Lin, G. O., & Richmond, D. 1993. Exploring green consumers in an oriental culture: Role of personal and marketing mix. *Advances in Consumer Research*, 20, 488-493.
- SO.CO Review. (n.d.). *SO.CO Review*. Retrieved from SO.CO Review: <https://review.soco.id/product/body-scrub-exfoliants/27797-body-scrub-coconut>. dilihat tanggal 17 Agustus 2023
- Steer, M., Cole, M., Thompson, R. C., & Lindeque, P. K. (2017). Microplastic ingestion in fish larvae in the western English Channel. *Environmental Pollution*, 226, 250-259. doi:<https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.03.062>
- Waste 4 change. 2023. *Daftar Kandungan Produk Kecantikan yang Justru Bahayakan Lingkungan!* Retrieved from Waste 4 change: <https://waste4change.com/blog/daftar-kandungan-produk-kecantikan-yang-justru-bahayakan-lingkungan/>. dilihat tanggal 17 Agustus 2023



TOURISM TAX: POTENSI DAN SOLUSI JAGA SURGA ALAM INDONESIA

[Yesika Mita Lela Pardede], [Anjani Bunga Irawan], [Afifah Salna Putri]
yesika.pardedel@student.ub.ac.id

A. KEBIJAKAN FISKAL KAITANNYA DENGAN POTENSI WISATA DI INDONESIA

Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengendalikan perekonomian, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dari sektor penerimaan khususnya pajak mengambil peran strategis dalam menunjang operasional fiskal pemerintah mengingat pajak sendiri berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara dan pengatur serta pengawas kegiatan swasta dalam perekonomian negara (Makmun, 2009). Pada era industri 4.0 untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 diperlukan serangkaian kebijakan untuk mengatasi eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan. Pajak lingkungan hadir sebagai solusi dari masalah tersebut dan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban dalam pengelolaan lingkungan (Wahyuningsih, 2021).

Green tax atau biasa dikenal dengan pajak lingkungan bertujuan untuk menunjang pembangunan suatu wilayah guna keberlangsungan lingkungan hidup. Perencanaan penerapan *green tax* di Indonesia sejalan dengan diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2017 mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Dalam penerapannya, *green tax* akan bergantung pada dampaknya bagi lingkungan. Semakin besar dampak yang diberikan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dipungut, di mana penerapan ini sangat cocok apabila dilakukan pada sektor pariwisata. Mengingat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Agoda. (2023). Malaysian Tourism Tax FAQs. Retrieved from <https://partnerhub.agoda.com/malaysian-tourism-tax-faqs/>. Dilihat 17 Agustus 2023
- Asmarani, Nora G. (2023). Apa itu Tourism Tax?. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-tourism-tax-1794173>. Dilihat 17 Agustus 2023
- Badan Pusat Statistik . (2023). *Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Desember 2022 mencapai 895,12 ribu kunjungan dan Jumlah penumpang angkutan udara internasional pada Desember 2022 naik 14,87 persen*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/01/1974/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-pada-desember-2022-mencapai-895-12-ribu-kunjungan-dan-jumlah-penumpang-angkutan-udara-internasional-pada-desember-2022-naik-14-87-persen.html> . Dilihat 16 Agustus 2023
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2020. Statistik Wisatawan Mancanegara ke Bali 2019. <https://bali.bps.go.id/publication/2020/07/24/e40b575f055874fc2eb05eee/statistik-wisatawan-mancanegara-ke-bali-2019.html>. dilihat 16 Agustus 2023.
- Candra, F. D. (2022). Kontradiksi kebijakan Green tax dan Green Incentive Indonesai terhadap tujuan SDG's 2030. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 106-107.
- CEIC. (2023). Malaysia Penghasilan Pajak. Retrieved from <https://www.ceicdata.com/id/indicator/malaysia/tax-revenue>. Dilihat 18 Agustus 2023
- Fauziah, Novie. (2023). Mengapa Indonesia Dijuluki Heaven of Earth?. Retrieved from <https://travel.okezone.com/read/2023/03/14/406/2781140/mengapa-indonesia-dijuluki-heaven-of-earth>. Dilihat 19 Agustus 2023
- Fang, Gouchang. (2023). Can green tax policy promote China's energy transformation?— A nonlinear analysis from production and consumption perspectives. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.126818>
- Fernada, D. S. (2022). Analisis Dampak, Manfaat dan realisasi Green tax di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 85-89.

- Gago, A., Labandeira, X., Picos, F., & Rodríguez, M. 2009. Specific and general taxation of tourism activities: Evidence from Spain. *Tourism Management*. 30(3), 381–392. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2008.08.004>.
- Handayani, R. (2023). *Pajak Wisatawan Bali: Antara Pro dan Kontra*. Retrieved from <https://www.pajak.com/pajak/pajak-wisatawan-bali-antara-pro-dan-kontra/>. Dilihat 14 Agustus 2023
- Hidayat, Khomarul. (2023). Ekonomi Bergairah, Pajak Daerah dari Sektor Pariwisata Melejit. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-bergairah-pajak-daerah-dari-sektor-pariwisata-melejit>. Dilihat 17 Agustus 2023
- Indonesia Packaging Recovery Organization. 2023. Sampah di Industri Pariwisata Perlu Penanganan Serius. https://indonesiapro.org/updates/Sampah_di_Industri_Pariwisata_Perlu_Penanganan_Serius. dilihat 18 Agustus 2023.
- KEMENPAREKRAF. (2023). *Siaran Pers : Menparekraf: Semua Wisatawan Ingin Pariwisata Bali Terus Terjaga*. Retrieved from <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-semua-wisatawan-ingin-pariwisata-bali-terus-terjaga> .Dilihat 16 Agustus 2023
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2023. Berkenalan dengan 5 Destinasi Super Prioritas Indonesia. <https://info5dsp.kemenparekraf.go.id/#:~:text=Lima%20DSP%20tersebut%20adalah%20Danau,serta%20Likupang%20di%20Sulawesi%20Utara>. dilihat 16 Agustus 2023.
- KOMINFO. (2015). *Saatnya Kembangkan Potensi Pariwisata Indonesia*. Retrieved from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/5640/saatnya-kembangkan-potensi-pariwisata-indonesia/0/infografis>. Dilihat 18 Agustus 2023
- Levent Selman Goktas, S. P. (2019). Tourist tax practice in European Union Member Countries and Its Applicability in Turkey. *Journal of Tourismology*, 150-151.
- Makmun. (2009). *Green Tax versus Green Incentive*. Retrieved from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2009/07/21/115454-igreen-tax-versus-green-insentivei>. Dilihat 2 Agustus 2023
- Mpofu, Favourate. Y. (2022). *Green Taxes in Africa: Opportunities and Challenges for Environmental Protection, Sustainability, and the Attainment of Sustainable Development Goals*. Sustainability. hh 4.

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Jambore Sapu Gunung Dan Deklarasi Gunung Lestari. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3300/jambore-sapu-gunung-dan-deklarasi-gunung-lestari> dilihat 18 Agustus 2023.
- Pertapsi. (2020). Catat! Ini Keunggulan PPN dari Sisi Fiskal, Psikologi, dan Ekonomi. Retrieved from <https://pertapsi.or.id/catat-ini-keunggulan-ppn-dari-sisi-fiskal-psikologi-dan-ekonomi>. Dilihat 18 Agustus 2023
- Ponjan, P., & Thirawat, N. 2016. Impacts of Thailand's tourism tax cut: A CGE analysis. *Annals of Tourism Research*. 61. 45-62. <http://doi.org/10.1016/j.annals.2016.07.015>.
- Presiden Republik Indonesia. (4, Mei 2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/249375/uu-no-15-tahun-2023#:~:text=UU%20ini%20mengatur%20mengenai%20Provinsi,dengan%20ketentuan%20peraturan%20perundang%2Dundangan>. Dilihat 14 Agustus 2023
- PSM News. 2023. Maldives receives USD63 million as Green Tax in 2022. <https://psmnews.mv/en/115065>. dilihat 16 Agustus 2023.
- Rahmawati, I. P. (2019) 'Konstruksi Pajak Lingkungan di Indonesia', *Wacana Hukum*, 25(2). 1–15.
- Rani Destia Wahyuningsih, N. M. (2021). Urgensi Penerapan Green Tax untuk Mendukung Environmentally Sustainable Development di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding eminar nasional Ekonomi dan Perpajakan*, 37- 47.
- Safarina, Hamida A. 2021. Mengenal Pajak Lingkungan dan Prinsip Pemungutannya. <https://news.ddtc.co.id/mengenal-pajak-lingkungan-dan-prinsip-pemungutannya-31270>. dilihat 10 Agustus 2023.
- Setiawan, Lisno. (2016). Perbandingan Komponen dan Struktur Pajak OECD dan Government Finance Statistic Manual dan Pengaruhnya atas Pendefinisian Tax Ratio di Indonesia. hh 4-6
- Sugiari, L. P. 2020. Bali Segera Menerapkan Pajak Lingkungan US\$10 per Wisatawan. *Bali Bisnis*, 10 Maret 2020. <https://bali.bisnis.com/read/20200310/538/1211311/bali-segera-menerapkan-pajak-lingkungan-us10-per-wisatawan>. dilihat 16 Agustus 2023.
- OECD. 2014. *OECD Tourism Trends and Policies 2014*. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/tour-2014-en>.

Wildan, M. (2023). *UU provinsi Bali diundangkan, Turis Asing Bisa Kena Pungutan Khusus*. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/uu-provinsi-bali-diundangkan-turis-asing-bisa-kena-pungutan-khusus-1794628>.
Dilihat 11 Agustus 2023



MENINJAU FISIBILITAS PENGENAAN PAJAK ATAS SAMPAH MAKANAN DI INDONESIA: SUATU GAGASAN DALAM MENGURANGI EMISI KARBON

[Muhammad Adzka Isma P. Dhana], [Natalie Syaina Abitta],
[Aqila Bagus Misbahuddin]
adzkaisma@gmail.com

A. PENGENAAN PAJAK ATAS SAMPAH MAKANAN INDONESIA UNTUK MENGURANGI EMISI KARBON

Bencana kebakaran di Australia beberapa waktu lalu yang menyentuh lebih dari 6,3 juta hektar wilayah disinyalir berawal dari adanya perubahan iklim (BBC, 2020). Hal yang sama juga disampaikan oleh pakar kebakaran hutan Universitas Thompson Rivers Michael Flannigan bahwa perubahan iklim dapat menjadi penyebab meningkatnya potensi kebakaran hutan yang terjadi di Amerika dan Kanada (Gratz, 2023). Tak hanya di luar negeri, Indonesia pun juga mengalami banjir di Banyumas dan di Makassar dengan individu yang terdampak lebih dari 10.000 warga menjadi wujud akibat adanya perubahan iklim (BBC, 2022; Darmawan, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

(Buku)

- Mansury, R. 1999. *Kebijakan Fiskal*. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan. Jakarta.
- Prasetyia, F. 2012. *Bagian V: Teori Eksternalitas*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Rosdiana, H. and Irianto, E.S. 2014. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Stiglitz, J. E., and Rosengard, J. K. 2015. *Economics of the public sector*. W. W. Norton.

(Laporan)

- Association of Cities and Regions for Sustainable Resource management*. (2009). *Pay-as-you-throw (PAYT) scheme in Schweinfurt Bin volume, frequency & weight-based scheme*. In ACR+.
- Bappenas. 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. p. 313. Available at: <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan...dan.../rpjmn-2015-2019/>.
- Clementine, O., Forbes, H. and Tom, Q. 2021. *Food Waste Index Report 2021*, Unep.
- FAO. 2011. *Global food losses and food waste*. Food and Agriculture Organization of The United Nation. <https://www.fao.org/3/mb060e/mb060e00.htm>
- FAO. 2022. *Enabling a legal environment for the prevention and reduction of food loss and waste*. In *FAO eBooks*. <https://doi.org/10.4060/cc2278en>
- Gaudillat, P. et al. 2018. *Best Environmental Management Practice for the Waste Management Sector Learning from frontrunners, Bemp 2018*. doi: 10.2760/50247.
- IEA. 2022. *Global Energy and Climate Model'*, p. 129 p.
- Legislative Council Secretariat*. (2012). *South Korea's waste management policies*.
- Ministry of Environment Institute. (2014). *Two Decades in Effect: Volume Based Waste Fee System in South Korea*.
- Ministry of Environment South Korea. 2016. *Two Decades in Effect: Volume-Based Waste Fee System in. South Korea. Korea Environmental Policy Bulletin*. Korea Environmental Policy Bulletin.

OECD. 2022. *Environment at a Glance Indicators* | OECD iLibrary, OECD Publishing.

UNEP. 2014. *Prevention and Reduction of Food and Drink Waste in Businesses and Households: Guidance for Governments, Local Authorities, Businesses and Other Organisations. Version 1.0*. United Nations Environment Programme Food and Agriculture Organization of the United Nations.
<https://wedocs.unep.org/20.500.11822/25194>

Artikel Jurnal

Alcalde, J., Corchón, L.C. and Moreno, B. 1999. Pigouvian Taxes: a strategic approach. *Journal of Public Economic Theory*, 1(2), pp. 271–281. Available at: <https://doi.org/10.1111/1097-3923.00012>.

Bilitewski, B. 2008. From traditional to modern fee systems. *Waste Management*, 28(12), 2760–2766. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2008.03.032>

Blakeney, M. 2019. *Food loss and food waste: Causes and solutions, Food Loss and Food Waste: Causes and Solutions*. doi: 10.4337/9781788975391.

Centemeri, L. 2009. Environmental damage as negative externality: uncertainty, moral complexity and the limits of the market. *E-cadernos Ces*, 05. <https://doi.org/10.4000/eces.266>

Elia, V., Gnoni, M. G., and Tornese, F. 2015. Designing Pay-As-You-Throw schemes in municipal waste management services: A holistic approach. *Waste Management*, 44, 188–195. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2015.07.040>

Lee, S. 2023. *The Benefits and Costs of a Small Food Waste Tax and Implications for Climate Change Mitigation*, pp. 1–69.

Lee, D. H., Behera, S. K., Kim, J. W., & Park, H. (2009). Methane production potential of leachate generated from Korean food waste recycling facilities: A lab-scale study. *Waste Management*, 29(2), 876–882. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2008.06.033>

Morlok, J., Schoenberger, H., Styles, D., Galvez-Martos, J., & Zeschmar-Lahl, B. 2017. *The impact of Pay-As-You-Throw schemes on municipal solid waste management: the exemplar case of the County of Aschaffenburg, Germany*. *Resources*, 6(1), 8. <https://doi.org/10.3390/resources6010008>

Reichenbach, J. 2008. Status and prospects of pay-as-you-throw in Europe – A review of pilot research and implementation studies. *Waste Management*, 28(12), 2809–2814. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2008.07.008>

- Schanes, K., Dobernick, K., and Gözet, B. 2018. Food waste matters - A systematic review of household food waste practices and their policy implications. *Journal of Cleaner Production*, 182, 978–991. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.030>.
- Skumatz, L.A. 2008. “Pay as you throw in the US: Implementation, impacts, and experience,” *Waste Management*, 28(12), pp. 2778–2785. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2008.03.033>.
- Ukkonen, A., & Sahimaa, O. 2021. Weight-based pay-as-you-throw pricing model: Encouraging sorting in households through waste fees. *Waste Management*, 135, 372–380. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2021.09.011>

Skripsi, Tesis, Disertasi

- Boda, K. 2017. *Addressing the externalities of food waste generated within the retail food market*. University of Calgary. Canada

Website

- BBC. 2020. *How did Australia fires start and what is being done? A very simple guide*. - BBC News. Available at: <https://www.bbc.com/news/world-australia-50980386>.
- BBC. 2022. *Banjir dan hujan deras: Ribuan warga Makassar terdampak banjir, bagaimana dengan wilayah lain?* - BBC News Indonesia. Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce97y1vr7vlo>.
- Darmawan, L. 2022. *Cuaca Ekstrem Kembali Datangkan Bencana, Dampak Perubahan Iklim?*
- [Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id): [Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id). Available at: <https://www.mongabay.co.id/2022/03/18/cuaca-ekstrem-kembali-datangkan-bencana-dampak-perubahan-iklim/>.
- Gratz, I. (2023) *An expert explains how climate change is worsening wildfires in North America*
| [Maine Public](https://www.mainepublic.org). Available at: <https://www.mainepublic.org/environment-and-outdoors/2023-07-24/an-expert-explains-how-climate-change-is-worsening-wildfires-and-how-they-might-be-mitigated>.
- Lindsey, R. (2023) *Climate Change: Atmospheric Carbon Dioxide* | NOAA Climate.gov. Available at: <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-atmospheric-carbon-dioxide>.

- Rosary, E. (2023) *Cuaca Ekstrem Kembali Melanda NTT, Apa Langkah yang Harus Dilakukan?* - Mongabay.co.id: Mongabay.co.id.
Available at: <https://www.mongabay.co.id/2023/01/06/cuaca-ekstrem-kembali-melanda-ntt-apa-langkah-yang-harus-dilakukan/>.
- SIPSN (2023) *Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah*. Available at: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>.
- Statista (2021) *Annual food waste by select country worldwide*. Available at: <https://www.statista.com/statistics/933083/food-waste-of-selected-countries/>.
- Tax Foundation (n.d) *Pigouvian Tax Definition*. Available at: <https://taxfoundation.org/tax-basics/pigouvian-tax/>.



CARBON TAX REFORM: IMPLEMENTASI PAJAK DALAM MEMBANGUN *GREEN INDUSTRY* UNTUK *GLOBAL NET ZERO EMISSION 2050*

[Shaula Nada Aulia], [Rais Ridho Bintang Arfani], [Nazwa Azzahra]
221111122025@mhs.ulm.ac.id

A. PAJAK DALAM *GREEN INDUSTRY*

Dunia diambang kemusnahan karena emisi karbon yang memicu pemanasan global. Emisi karbon dunia mencapai 36,8 GtCO_{2e} atau tumbuh 0,9% pada tahun 2022 (IEA, 2023). Indonesia mengalami kenaikan suhu 0,03°C per tahunnya dalam kurun waktu 37 tahun (BMKG, 2020). Oleh karena itu, *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap* (ICCSR) memperkirakan pada tahun 2030 muka air laut naik mencapai 6 cm hingga 30 cm yang mampu mengancam seluruh kehidupan di Indonesia (Dasanto, 2022). Fenomena ini akan merugikan perekonomian Indonesia hingga 1,4% PDB pada tahun 2050 dan berimbas pada sektor lain (Newswire, 2020).

Kerusakan ini menjadi tanggung jawab manusia. Khususnya, pemerintah mutlak melakukan langkah konkret dalam mengatasi ini. *Paris Agreement* menjadi komitmen para pemimpin dunia untuk menjaga peningkatan suhu rata-rata global di bawah 2°C. Oleh karena itu, muncul komitmen *Global Net Zero Emissions* tahun 2050 (UNEP, 2022). Pemerintah Indonesia juga melakukan berbagai upaya, mulai dari transisi energi, migrasi *green jobs*, revitalisasi hutan, dekarbonisasi sektor transportasi, serta perdagangan

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, W. 2022. Green Economy sebagai Strategi dalam Menangani Masalah Ekonomi dan Multilateral. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. 4(15). hh. 343-356.
- Badan Kebijakan Fiskal. 2021. Kenalkan Pajak Karbon untuk Mengendalikan Perubahan Iklim, Indonesia Ambil Manfaat sebagai Penggerak Pertama di Negara Berkembang. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/328>. dilihat 16 Agustus 2023.
- Barus, E. B., dan Wijaya, S. 2020. Pajak Karbon: Belajar dari Swedia dan Finlandia. CV. Adanu Abimata. Indonesia.
- Barus, E.B. dan Wijaya, S. 2021. Penerapan Pajak Karbon di Swedia dan Finlandia serta Perbandingannya dengan Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*. 5(2): 256-279.
- BMKG. 2020. Tren Suhu. <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=tren-suhu>. dilihat 1 Juli 2023. BPK. 2021. Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>. dilihat 3 Juli 2023.
- CNBC Indonesia. 2022. Apa itu Resesi Ekonomi? Pengertian, Penyebab & Dampaknya. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220715154451-72-356013/apa-itu-resesi-ekonomi-pengertian-penyebab-dampaknya>. dilihat 16 Agustus 2023.
- Darajati, Nugroho, D., & Rianto, A. 2022. Strategi Indonesia Dalam Mengurangi Emisi Karbon Dioksida (CO₂) Di Masa New Normal. <https://e-journal.umc.ac.id/index.php/IP/article/view/2712>. Dilihat 16 Juli 2023.
- Dasanto, B. D., Sulistiyanti, Anria, & Boer, R. 2022. Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kenaikan Muka Air Laut di Wilayah Pesisir Pangandaran. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan*. 9(2). hh. 82-94.
- Handoko, F. 2020. Green Industrial System Pendekatan Baru dalam Meningkatkan Daya Saing. Penerbit MK Press. Indonesia.
- IEA. 2023. CO₂ Emissions in 2022. <https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022>. dilihat 1 Juli 2023.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM). 2023. Miliki Potensi EBT 3.686 GW, Sekjen Rida: Modal Utama Jalankan Transisi Energi Indonesia. <https://www.esdm.go.id/id/media->

- center/arsip-berita/miliki-potensi-ebt-3686-gw- sekjen-rida-modal-utama-jalankan-transisi-energi-indonesia. dilihat 10 Agustus 2023.
- Kementerian ESDM. 2020. Menteri Arifin: Transisi Energi Mutlak Diperlukan. <https://ebtke.esdm.go.id/post/2020/10/22/2667/menteri.arifin.transisi.energi.mutlak.di.perlukan?lang=en>. dilihat 2 Juli 2023.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 2022. Informasi APBN 2022 Melanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). 2021. Kenalkan Pajak Karbon untuk Mengendalikan Perubahan Iklim, Indonesia Ambil Manfaat Sebagai Penggerak Pertama di Negara Berkembang. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/328>. dilihat 16 Agustus 2023.
- Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu RI). 2023. UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html#:~:text=UMKM>. dilihat 1 Agustus 2023.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2022. Menko Airlangga: Kembangkan Green Economy, Permerintah Komitmen Mereduksi Emisi Karbon. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3990/menko-airlangga-kembangkan-green-economy-pemerintah-komitmen-mereduksi-emisi-karbon>. dilihat 2 Juli 2023.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI). 2012. Pendalaman Struktur Industri Efisiensi dan Efektivitas dalam Implementasi Industri Hijau. <https://kemenperin.go.id/download/6297/Efisiensi-dan-Efektivitas-dalam-Implementasi-Industri-Hijau>. dilihat 9 Juli 2023.
- KOMINFO. 2015. Distribusi BBM Lancar, Harga Bahan Pokok Stabil. Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id). dilihat 16 Agustus 2023.
- Kompas.id. 2018. Potensi Energi Terbarukan Indonesia Belum Terserap Maksimal. <https://www.kompas.id/baca/utama/2018/04/20/potensi-energi-terbarukan-indonesia-belum-terserap-maksimal>. dilihat 13 Agustus 2023.
- Newswire. 2020. Potensi Kerugian Akibat Perubahan Iklim Capai Rp132 Triliun pada 2050. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200415/9/1227201/potensi->

- kerugian-akibat- perubahan-iklim-capai-rp132-trilin-pada-2050. dilihat 1 Juli 2023.
- Nugroho, D. N., & Rianto, A. 2022. Strategi Indonesia dalam Mengurangi Emisi Karbon Dioksida (CO₂) Di Masa New Normal. Prosiding Ilmu Pemerintahan. 1(1) hh. 228- 242.
- Pamungkas, B.N. dan Haptari, V.D. 2022. Analisis Skema Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia Berdasarkan United Nations Handbook Mengenai Penerapan Pajak Karbon. Jurnal Pajak Indonesia. 6(2): 357-367.
- Peter G. Peterson Foundation. 2021. What Is A Carbon Tax? How Would It Affect The Economy?. <https://www.pgpf.org/budget-basics/what-is-a-carbon-tax-how-would-it-affect-the-economy>. dilihat 15 Agustus 2023.
- Purnamasari, S. 2022. Antologi Pemikiran: Memacu Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan. Universitas Katolik Soegijapranata. Indonesia.
- Putri, C.A. 2021. Terbongkar! Ini Alasan Kenapa Investasi EBT Masih Mini. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211220150003-4-300628/terbongkar-ini-alasan-kenapa-investasi-ebt-masih-mini>. dilihat 13 Agustus 2023.
- Ratnawati, D. 2016. Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan untuk Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik. 1(2). hh. 53-67.
- Renewable Energy Indonesia (REI). 2023. Data Energi Terbaru. <https://renewableenergy.id/data-energi-terbaru/#:~:text=13>. dilihat 1 Agustus 2023. Rusmana, O., dan Purnaman, S. M. N. 2020. Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon dan Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, 22(1). hh. 42-52.
- Setya, D. 2022. 10 Negara Paling Berpolusi di Dunia, Indonesia Nomor Berapa?. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6137633/10-negara-paling-berpolusi-di-dunia-indonesia-nomor-berapa>. dilihat 14 Agustus 2023.
- Tambunan, N., Aprilia, S., dan Rahayu, N. P. 2022. Study Literature: Dampak Kenaikan BBM Bagi Perekonomian Rakyat. Sibatik Journal. 2(1). hh. 329-335.
- UN Environment Programme. 2021. Green Taxation Can Hel Us Recover From The Covid-19 Crisis. <https://greenfiscalspolicy.org/green-taxation-can>

- help-us-recover-from-the- covid-19-crisi-heres-how/. dilihat 16 Agustus 2023.
- UNEP. 2022. Emissions Gap Report 2022: The Closing Window — Climate crisis calls for rapid transformation of societies. <https://www.unep.org/emissions-gap-report-2022>. dilihat 1 Juli 2023.
- Utama, D. M., Baroto, T., Maharani, D. M., Jannah, F. R., & Octaria, R. A. 2018. Algoritma ant-lion optimizer untuk meminimasi emisi karbon pada penjadwalan flow shop dependent sequence set-up. *Jurnal Litbang Industri*. 9(1). hh. 69-78.
- Widyantoro, S. 2017. Implementasi Kerjasama Indonesia dan Jepang dalam Kebijakan Green Industry. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 5(1). hh. 95-106.
- World Bank. 2019. Carbon Pricing Dashboard. <https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/>. dilihat 15 Juli 2023.
- World Inequality Lab. 2022. World Inequality Report 2022. <https://wir2022.wid.world/>. dilihat 3 Juli 2023.



EVALUASI PENERAPAN *CARBON PRICING SCHEME* DAN *REDD+ SCHEME* DALAM MENGEJAR *NET ZERO EMISSION* DI INDONESIA

[David Susanto], [Ferdinand Yiwa],
[Sang Ketut Wahyu Paramartha Kebon]
davidsimz315@gmail.com

A. PENERAPAN *CARBON PRICING* DAN *REDD+ SCHEME* DI INDONESIA

Dalam beberapa tahun terakhir, emisi gas rumah kaca dan karbon dioksida semakin meningkat. Upaya organisasi dunia untuk menekan angka tersebut nampaknya semakin jauh dari harapan. Pasalnya, emisi gas rumah kaca dan karbon dioksida menyentuh angka tertinggi pada tahun 2022. Peningkatan ini datang dari sektor energi yang memproduksi gas rumah kaca lebih tinggi 0.9 persen dan mencapai 36.8 gigaton, dan produksi karbon dioksida dari batubara yang meningkat 1.6 persen dari tahun lalu.¹ Rekor tersebut menjadi sinyal bahwa terdapat beberapa urgensi kebijakan yang harus segera dilaksanakan dan mengajak seluruh negara untuk berpartisipasi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan karbon dioksida.

Peningkatan emisi jelas menghambat misi organisasi dunia untuk mencapai *Global Net Zero Emission* pada tahun 2050 nanti. Berdasarkan data dari Uni Eropa, Indonesia menduduki peringkat ke-sebelas sebagai negara penyumbang emisi gas rumah kaca dan karbon dioksida di dunia.² Hal ini membuat Indonesia turut berpartisipasi dan berkomitmen akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan karbon dioksida. Salah satu aksi Indonesia ialah

DAFTAR PUSTAKA

- Brilian, A. P. 2023. Ini Syarat Mobil Listrik Bisa Dapat Insentif Pajak. <https://finance.detik.com/industri/d-6660140/ini-syarat-mobil-listrik-bisa-dapat-insentif-pajak>. dilihat 30 Juli 2023.
- Cresswell, W. J., & Creswell, J. W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Indonesia CNN. 2023. RI Diklaim Keluar 10 Besar Negara Penyumbang Emisi GRK, Cek Faktanya. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230614004647-199-961467/ri-diklaim-keluar-10-besar-negara-penyumbang-emisi-grk-cek-faktanya>. dilihat 30 Juli 2023.
- International Energy Agency. 2023. CO2 Emissions in 2022. Maret. IEA Publications. France.
- PLN, S. P. 2020. Transformasi, PLN Dorong Penggunaan Energi Ramah Lingkungan. <https://web.pln.co.id/media/siaran-pers/2020/07/transformasi-pln-dorong-peggunaan-energi-ramah-lingkungan>. dilihat 30 Juli 2023.
- Nisaputra, R. 2020. Pemerintah Mau Jual 80% Kredit Karbon Dunia yang Dimiliki RI. <https://infobanknews.com/pemerintah-mau-jual-80-kredit-karbon-dunia-yang-dimiliki-ri-%EF%BB%BF/>. dilihat 30 Juli 2023.
- Seymour, F. 2019. Berhasil Kurangi Deforestasi, Indonesia Mulai Dibayar Norwegia. <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/berhasil-kurangi-deforestasi-indonesia-mulai-dibayar-norwegia>. dilihat 30 Juli 2023.
- Umah, A. 2021. Simak, Begini Skema Pajak Karbon pada PLTU Batu Bara. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211022123917-4-285787/simak-begini-skema-pajak-karbon-pada-pltu-batu-bara>. dilihat 30 Juli 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 29 Oktober 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta.

Whitehead, J. N/A. Econ 101: Carbon Tax vs, Cap-and-Trade, https://www.env-econ.net/carbon_tax_vs_capandtrade.html#:~:text=The%20only%20difference%20is%20the,%2C%20command%20and%20control%20regulation. dilihat 1 Agustus 2023.

OPTIMIZING FISCAL POLICY

To Realize Global Net Zero Emission 2050
As A Momentum To Achieve
Sustainable Development Goals (SDGs)

Ketika peran pajak kian penting dan ketika nafsu utang semakin besar, serta tuntutan pendanaan pembangunan meningkat, ternyata pemerintah juga kian getol mengeluarkan obligasi negara. Oleh karena itu, beban keuangan terkuras untuk menutup pembiayaan itu. Padahal, potensi pajak masih terbuka dieksplorasi dan dieksploitasi penerimaannya. Ironisnya, di sisi lain kasus perpajakan menjadi anti klimaks dari komitmen Ditjen Pajak untuk mendorong kesadaran dan kepedulian serta tingkat kepatuhan wajib pajak, bukan hanya wajib pajak badan tetapi juga perorangan. Dari fakta ini, target peroleh pajak tahun 2023 kian berat untuk direalisasikan, meski di sisi lain tetap harus optimis bahwa masih ada potensi untuk mencapai target. Oleh karena itu, target perolehan pajak tidak bisa lepas dari program edukasi. Suksesnya edukasi secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga memunculkan kesadaran dari masyarakat terkait urgensi penerimaan pajak. Membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak juga harus diimbangi dengan profesionalisme dan edukasi kepada wajib pajak agar muncul kesadaran kolektif dari urgensi pajak. Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB dalam rangka ingin mensejahterakan masyarakat dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di negara yang membutuhkan bantuan.